



Gedung Terpadu Sudah Retak

PONTIANAK - Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan mendadak di sekolah terpadu, SMP Negeri 23 dan SD Negeri 06 Kota Pontianak di Jalan S Parman. Kunjungan ini menindaklanjuti laporan yang menyebutkan bahwa gedung sekolah tersebut banyak rusak, seperti dinding retak, lantai jebol, dan bangunan miring.

Pantauan *Pontianak Post* di lapangan, beberapa bagian dinding sekolah itu sudah mulai retak-retak baik ukuran kecil maupun besar, huruf-huruf papan nama sekolah sudah bertanggalan, dan tembong sekolah terlihat miring.

Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Daya yang ikut serta dalam kunjungan itu, menemukan dinding sekolah di bagian belakang yang tidak diplester, sehingga batakonya terlihat. Bahkan, masih ada papan mal yang belum dilepas oleh pekerja.

Pihaknya juga menemukan toilet yang terletak di lantai dua dan tiga sekolah tidak bisa digunakan, plafon banyak rusak, bahkan tampak basah karena atap bocor. Salah satu ruangan yang digunakan sebagai musala hanya menggunakan triplek lantaran semennya telah jebol.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



Gedung Terpadu Sudah Retak

Sambungan dari halaman 9

Harry mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan laporan yang masuk sejak dua bulan lalu tentang adanya dugaan pembangunan gedung sekolah terpadu yang tidak sesuai dengan rencana pembuatannya. "Saya coba lakukan pengecekan hari ini (kemarin) ternyata benar. Itu dapat dilihat dari kondisi bangunan yang banyak rusak," katanya, Senin (25/8).

Dia menuturkan dari hasil pengecekan yang dilakukan langsung, banyak ditemukan retakan-retakan di dinding mulai dari ukuran kecil hingga besar, pintu kelas yang sudah rusak, dinding yang tidak di plester, toliet tidak bisa digunakan, lantai ruangan jebol lalu diganti dengan triplek dan ditutup karpet. "Terlalu banyak yang rusak, bangunan sangat tidak layak dan tidak sesuai dengan anggaran kucuran anggaran hingga Rp11 miliar," ucapnya.

Dia meminta penegak hukum tidak tutup mata, tidak diam dengan proyek pembangunan sekolah terpadu tersebut. "Saya minta pejabat terkait diperiksa. Karena informasi yang masuk, Kejari sudah melakukan pemeriksaan namun sampai saat ini kasus ini tidak ada kabar. Saya minta kepolisian un-

tuk masuk dan memeriksa," ujarnya.

Dia menilai kondisi bangunan yang sudah banyak rusak dan tidak sesuai dengan rencana pembangunan gedung menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi rekayasa anggaran pada proyek pembangunan gedung sekolah terpadu untuk mengambil keuntungan. "Kasus ini harus diproses. Saya akan memanggil pihak yang berwenang khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk memberikan penjelasan, kenapa kondisi bangunan sekolah terpadu sangat tidak layak," tegasnya.

Kepala SMP Negeri 23 Pontianak Julaina mengatakan terkait dengan banyaknya bangunan yang retaknya, pihaknya telah memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak. "Kami hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar, masalah pembangunan kami tidak tahu," katanya. Terkait dengan kerusakan, lanjut dia, seperti toilet dilakukan perbaikan. "Kalau untuk musala memang sebelumnya ruangan perpustakaan, kami ubah fungsi karena untukantisipasi lantai tidak mampu menahan beban berat. Yang jelas, karena kondisi bangunan banyak yang rusak, anak-anak kami imbau untuk tidak bermain

di bangunan yang miring," ucapnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Kusus Kejari Pontianak Santoso membenarkan telah melakukan penyelidikan terkait pembangunan gedung sekolah terpadu. "Dalam penyelidikan, kami melibatkan ahli independen untuk menghitung apakah pekerjaan sesuai dengan rencana pembangunan atau tidak, apakah ada korupsi atau tidak?" katanya.

Dari hasil penjelasan ahli independen tersebut, lanjut dia, bahwa pengerjaan gedung sekolah terpadu sudah sesuai dengan rencana pembangunan gedung. "Yang mengatakan ahli, dari kesimpulan laporan yang disampaikan bahwa semua item pekerjaan yang ada di dalam kontrak sudah dikerjakan dengan baik dengan memenuhi spesifikasi teknis dan secara teknis pekerjaan dapat diterima," ucapnya.

Perhitungan volume yang terpasang di lapangan, dia menambahkan, dari laporan yang disampaikan tidak ditemukan kekurangan volume yang. Di dalam laporan juga ada saran yang disampaikan, yakni perbaikan pondasi dengan menambah pondasi lanjut. "Kami dari Kejari berdasarkan laporan itu, dengan kondisi yang sebenarnya maka penyelidikan dihentikan," tegasnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan gedung terpadu, SMP 23 dan SD 6 di Jalan S Parman sudah berfungsi. Dia mengakui gedung tersebut mengalami keretakan pada beberapa titik. "Tetapi pembangunannya sudah sesuai bestek," katanya, Senin (25/8). Keretakan terjadi karena alas pondasi gedung tersebut disangga oleh cerucuk. Ketika beban berat dan berdiri di atas lahan gambut keretakan tidak dapat dihindari.

Edi menyebut kondisi ini wajar pada lahan gambut seperti di Kota Pontianak. "Di kota ini, kalau bangunan disangga oleh cerucuk wajar ada keretakan-keretakan sedikit," tuturnya. Ketika bestek gedung menggunakan sangga cerucuk, kemudian terjadi keretakan, Edi menganggapnya sebagai faktor alam. "Dalam suatu pembangunan itu, awalnya diprediksi tanahnya keras, kemudian ternyata rawa atau gambut itu faktor alam," ungkapnya.

Edi membenarkan bahwa terhadap keretakan gedung terpadu tersebut aparat keamanan pernah melakukan pemeriksaan. Kontraktor pembangunan gedung itu bertanggung jawab melakukan perbaikan karena dianggap pemeliharaan. "Sudah diperiksa BPK. Sekarang sudah diperbaiki dan berfungsi," katanya. **(adg/hen)**